

PENGARUH DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Eka Jumarni Fithri¹⁾, Darul Amri²⁾, dan Endah Widyastuti³⁾

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: Ekajf.2f@gmail.com

ABSTRACT

This study aims at testing the influence of utilization of internal control system and accounting information technology to the accountability of village fund allocation management (ADD) either partial and simultaneous. Population how many 190 of village apparatus in this study was in 19 villages the district of RambutanBanyuasin Regency of South Sumatra. The sample technique used is purposive sampling with the samples were 57 respondents. The data taken in the form of primary data obtained from the results of the questionnaire. The data analysis is preceded by the validity test, the reliability test and the classical assumption test. Data of normality test result stated normal distribution regression model, no multicollinearity and heteroscedasticity problems occur. Analytical method used is double linear regression using program SPSS version 20. The result of this study that partial of internal control system to the accountability of village fund allocation management (ADD) and the utilization of accounting information technology partial the influence to the accountability of village fund allocation management (ADD) while simultaneous of internal control system and the utilization of accounting information technology the influence to the accountability of village fund allocation management (ADD).

Keywords : internal control system, accounting TI, accountability ADD management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 190 perangkat desa di 19 desa Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel dipilih secara purposive sampling dengan sampel sebanyak 57 responden. Data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Analisis data didahului dengan uji validitas, uji realibilitas dan asumsi klasik. Data hasil uji normalitas menyatakan model regresi berdistribusi normal, tidak terjadi masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan secara simultan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kata Kunci : Pemanfaatan TI Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan ADD

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kemandirian Desa baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sistem Pengendalian intern diharapkan dapat menghindari resiko terjadinya penyelewengan, penyimpangan dan korupsi diperlukan pengelolaan alokasi dana desa yang

dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, kecepatan pemrosesan transaksi dan penyusunan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*.

Pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan mengeluarkan kebijakan yaitu salah satunya pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala kebutuhan di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kecamatan Rambutan merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh anggaran alokasi dana desa (ADD) tertinggi kedua setelah Kecamatan Muara Sugihandari Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2016 alokasi Dana Desa yang diperoleh Kecamatan Rambutan sebesar Rp. 2.826.250.000, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.918.985.986. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 35 tahun 2017 pasal 18 menyebutkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi 3 tahap yaitu tahap pertama dilakukan pada bulan Februari sampai Maret sebesar 40%, tahap kedua dilakukan pada bulan Juni sampai Juli sebesar 40% dan pada tahap ketiga dilakukan

pada bulan September sampai Oktober sebesar 20%.

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 35 tahun 2017 digunakan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penggunaan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain membayar penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Non PNS, Kepala Dusun, Bendahara Desa dan serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 35 tahun 2017, untuk operasional pemerintah desa sebesar 52%, 25% untuk operasional kegiatan BPD, 10% untuk operasional dan kegiatan PKK, 7% untuk operasional dan kegiatan Posyandu, 3% masing-masing untuk kegiatan dan operasional Karang Taruna, LINMAS dan Adat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Derminan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”**.

TELAAH LITERATUR

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan

Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2011). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang–Undangan. Adapun unsur–unsur

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja dalam melaksanakan tugas harian aparatur pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.*(1991) dalam Wijana (2007): Manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) Akuntabilitas adalah: kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa menurut Sukasmanto dalam Sumpeno (2011 : 222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan

bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban perangkat desa untuk memberikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pengawasan serta pertanggungjawaban.

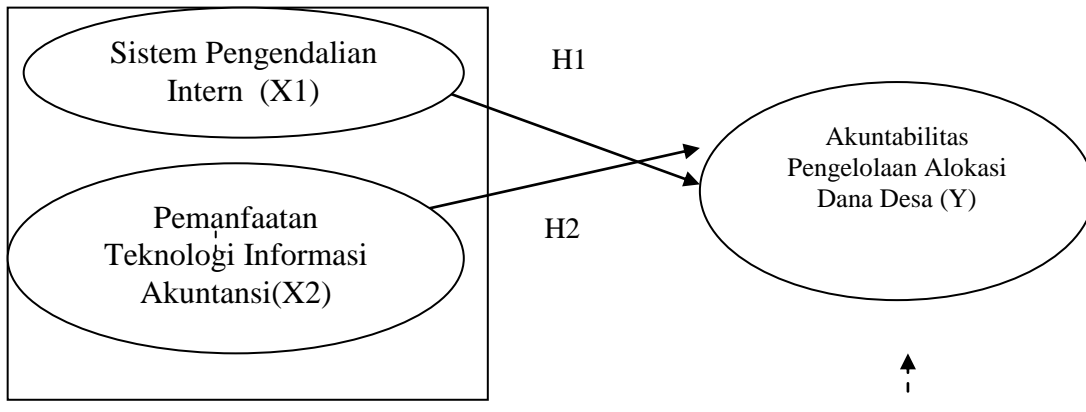
Kerangka Pemikiran

Sistem Pengendalian intern diharapkan dapat menghindari resiko terjadinya penyelewengan, penyimpangan dan korupsi diperlukan pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, kecepatan pemrosesan transaksi dan penyusunan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Ketentuan mengenai Perdesaan telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 telah mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian beberapa referensi dari penelitian terdahulu maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 1
Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Sistem Pengendalian Intern (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi(X₂). Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah *Summated Rating Method: Likert Scale* atau skala Likert (bertingkat) dengan lima alternative jawaban dan masing-masing diberi skor.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 19 Desa.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karakteristik dalam pengambilan sampel berdasarkan referensi di atas adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan yang ada di setiap masing-masing desa.
2. Perangkat Desa yang terlibat secara langsung dalam proses pencatatan transaksi keuangan Desa dan bertugas untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Desa.

Berdasarkan criteria sampel tersebut diperoleh 57 responden. Dimana setiap desa diambil 3 responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa yang telah memenuhi kedua criteria sampel diatas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda, metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel(variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya(variabel dependen).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Setelah nilai hitung diperoleh maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t- hitung tersebut dengan nilai t-tabel pada taraf signifikansi sebesar $\alpha=0,05$ dan derajat keabsahan (dk) =n-2.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrument dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien *Alpha Cronbach* < 0,60, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. (Priyatno, 2012: 184).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi

Uji Normalitas Data

Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test untuk melakukan uji normalitas data dengan taraf signifikansi 5%. Menurut Priyatno (2012:147) “Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.”

Uji Multikolinearitas

Metode yang digunakan untuk menguji multikolinearitas yaitu dengan melihat Nilai Tolerance dan Inflation Factor (Vif) pada Model Regresi Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji Gletser dengan melakukan regresi antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas (Priyatno, 2012:158).

Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan satu variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa) dan dua variabel independen (Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi Perangkat Desa), dengan rumus :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil SPSS 2018 sebagai berikut :

Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial (uji t) terhadap masing-masing variabel independen: Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t-hitung dan signifikansinya. Signifikansi tiap variabel, maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai t-hitung dan t-tabel setiap variabel X. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. dan jika nilai t-hitung < t-tabel maka variabel X secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai t-tabel dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 55-4-1 = 50. Hasil diperoleh untuk t-tabel sebesar 2,009/-2,009..

Pengujian variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X2), dari output SPSS didapat t hitung sebesar 4,775. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi 0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 55-4-1 = 50. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,009/-2,009 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung > t tabel (4,775 > 2,009) maka H1 diterima. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H1 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H1 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0.05 (0.0000 < 0.05) maka H1 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 5,704 dengan nilai signifikansi 0.0000, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Uji F (Simultan)

Pengujian simultan variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X2), ditetapkan ketentuan bahwa jika F-hitung > F-tabel maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen (X1, X2,) secara simultan mempengaruhi variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Nilai F-tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 4 dan df 2 (n-k-1) atau 55-4-1 = 50 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F-tabel sebesar 2,557. Nilai F-hitung adalah sebesar 16,728 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 16,728 lebih besar dari F tabel 2,557, sehingga dapat dinyatakan bahwa

Pembahasan

Hubungan Sistem pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil penelitian variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung sebesar 2,082. dengan tingkat signifikansi 0.043 lebih kecil dari signifikansi 0.05 (5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) atau dengan kata lain hipotesis (H4) diterima. Semakin besar sistem pengendalian internal, maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) akan semakin meningkat.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil penelitian variabel pemanfaatan teknologi informasi akuntansi memiliki nilai t hitung sebesar 4,775. dengan tingkat signifikansi 0.0000 lebih kecil dari signifikansi 0.05 (5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) atau dengan kata lain hipotesis (H1) diterima. Semakin besar pemanfaatan teknologi informasi, maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) akan semakin meningkat.

Hubungan Sistem pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Variabel sistem pengendalian internal (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi (X2), secara simultan mempengaruhi variabel dependen akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y).

Tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel pemanfaatan teknologi informasi akuntansi (X1), dan sistem pengendalian internal (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) sebesar 0%. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat diterima.

SIMPULAN

1. Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Secara simultan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Dura Justita. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- Prapto Susilo. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia .Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

_____.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

_____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

_____.Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

_____.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 35 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin tahun 2017.

Widyatama, Arif, Novita Lola dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Wijayanti, Ratna dan Nur Handayani. 2017. "Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan